

PENILAIAN KEAMANAN INFORMASI E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN INDEX KEAMANAN INFORMASI (KAMI) 4.0

I Gede Putu Krisna Juliharta¹⁾, Komang Tri Werthi²⁾

Ni Luh Putu Ning Septyarini Putri Astawa³⁾

Program Studi Sistem Informasi¹³⁾ Program Studi Sistem Informasi Akuntansi²⁾

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK) Primakara

krisna@primakara.ac.id¹⁾ triwerthi@primakara.ac.id²⁾ ningseptyarini28@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Indonesian government uses advanced technology by implementing e-government in improving services to the community and increasing bureaucratic approval. One of the government institutions that request e-government is the Denpasar City government which is managed by the Denpasar City communication and informatics department. In e-government users, it is necessary to implement an information security management system from the electronic system used. The use of KAMI index 4.0 provides a summary of the application of information security systems in the Denpasar city system depending on the level I-I + which has a reactive nature, and needs further development (not feasible) to be able to obtain ISO 27001: 2013 certification.

Keywords : e-government; kami; information security; iso 27001.

ABSTRAKSI

Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan menerapkan e-government dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi birokrasi. Salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan e-governement adalah pemerintah kota Denpasar yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika Kota Denpasar. Dalam pemanfaat e-government perlu dilaksanakan pengukuran terhadap sistem manajemen keamanan informasi dari sistem elektronik yang digunakan. Penggunaan index kami 4.0 memberikan kesimpulan penerapan sistem manajemen keamanan informasi di sistem kota Denpasar berada pada level I-I+ yang memiliki sifat reaktif, dan perlu pengembangan lebih lanjut (tidak layak) untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013

Kata kunci : e-government; kami; keamanan informasi; iso 27001.

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang didukung teknologi jaringan komputer dalam hal ini internet, memungkinkan informasi terjalin dari satu belahan dunia ke belahan dunia yang lain dalam waktu singkat. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan menerapkan e-government dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi birokrasi. Menurut e-government Development Index (EGDI) Pada tahun 2018 layanan e-governement Indonesia mendapat peringkat ke-10 , naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura

(peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Philippines (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI) [1].

Sejalan dengan itu penerapan e-government di Indonesia juga masih di level *emerging* dan *enhance presence*, hanya sebagian kecil yang sudah mengimplementasikan *interactive stage*. Level *emerging* adalah level terendah dalam adopsi e-government di mana pemerintah telah memiliki website tetapi informasi yang disediakan terbatas dan statis, *enhanced* berarti bahwa konten dan informasi yang disediakan dalam website selalu diperbarui secara berkala, sedangkan *interactive stage* berarti bahwa website sudah menyediakan fitur pengunduhan formulir, kontak resmi, dan memungkinkan user untuk melakukan interaksi dengan pemerintah melalui

website[1]. Penerapan e-government juga bukanlah tanpa resiko, resiko bisa berasal dari serangan hacker, misconfigurasi system ataupun kesalahan pengelolaan.

Penerapan e-government selama ini bukanlah tanpa halangan dan ancaman. Berdasarkan laporan tahunan Honey-net Project Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Tahun 2018, jumlah total serangan siber yang menyerang Indonesia sebanyak 12.895.554 serangan, dengan jumlah serangan malware sebanyak 513.863 serangan. Terdapat 3 sumber serangan tertinggi yaitu berasal dari Rusia, China, dan Amerika Serikat [https://bssn.go.id/mengenali-serangan-siber-global-dan nasional-melalui-laporan-tahunan-honeynet-project-bssn-ihp-tahun-2018/](https://bssn.go.id/mengenali-serangan-siber-global-dan-nasional-melalui-laporan-tahunan-honeynet-project-bssn-ihp-tahun-2018/)

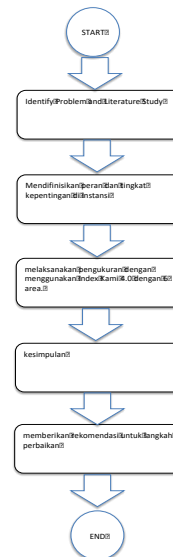
Salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan e-government adalah pemerintah kota Denpasar yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika Kota Denpasar. Bahkan Denpasar sudah mendeklarasikan program smart city. Pemerintah kota Denpasar juga telah lulus dalam gerakan menuju 100 smart city Indonesia yang digagas oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan e-government di Denpasar Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga mendorong seluruh Lembaga Pemerintahan untuk melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi melalui Peraturan Menteri No 4 Tahun 2016.

Dalam rangka penguatan sistem manajemen pengamanan informasi tersebut telah disiapkan instrument untuk melakukan proses pengukuran yang di sebut sebagai Index keamanan informasi (KAMI). Dalam prosesnya Index kami terus berkembang dari versi 1.0 hingga sekarang dikembangkan oleh badan siber dan sandi negara hingga versi 4.0. perbedaan mencolok di versi 4.0 ini adalah mulai dilaksanakan pengukuran terhadap kesepakatan langkah pengamanan dengan pihak ke tiga, penerapan keamanan untuk cloud computing dan perlindungan untuk data pribadi.

Index kami merupakan pengukuran yang bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggara e-government untuk dapat menempuh sertifikasi ISO 27001. Serta mengukur tingkat kematangan sistem yang

dimiliki berdasarkan COBIT 5.0. area yang diukur dalam index kami meliputi kategori sistem elektronik, tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan asset informasi, teknologi dan keamanan informasi, serta suplemen terkait penggunaan cloud computing dan kerjasama pihak ke 3.

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. *Research Methodology*

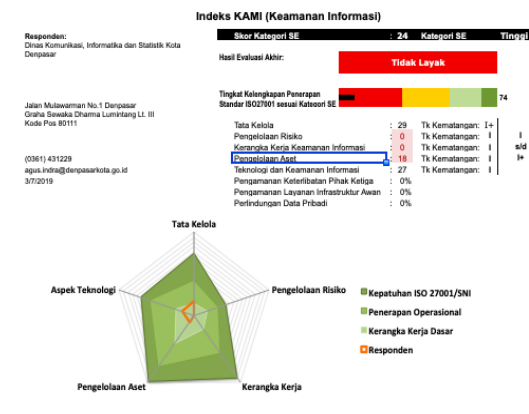
Proses information security assessment e-government using index kami 4.0 dimulai dengan proses identifikasi dan melaksanakan studi literature, dilanjutkan dengan mendefinisikan peran dan tingkat kepentingan di instansi terkait, untuk selanjutnya dapat melaksanakan pengukuran dengan menggunakan index kami 4.0 yang berisi 7 kategori pertanyaan. setelah melaksanakan pengukuran dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui proses wawancara dengan pihak pengelola sistem di dinas komunikasi informasi dan statistik kota denpasar sehingga hasilnya bersifat subyektif.

Selain proses wawancara proses pengumpulan data juga memberikan panduan mengenai pengisian Index Kami 4.0, menelusuri dokumen dokumen terkait kebijakan pengelolaan, penggunaan, dan proses evaluasi sistem informasi di lingkup Kota Denpasar. Index Kami 4.0 digunakan berdasarkan hasil kesepakatan, dan sistem manajemen keamanan informasi di Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan teknologi cloud computing dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan beberapa sistem yang memberikan layanan kepada masyarakat. Hasil dari Index Kami 4.0 untuk sistem manajemen pengamanan informasi di kota Denpasar dapat dilihat pada figures 2.



Gambar 2 Index kami 4.0

Data Pengukuran Index Kami 4.0

Dalam proses pengukuran indeks kami 4.0 ada total 7 langkah dengan setiap langkah memiliki pertanyaan terkait kategori masing masig. Langkah pertama dalam pengukuran Indexs Kami 4.0 adalah mengisi identitas responden yaitu identitas instansi, alamat, nomer telp, identitas pengisi lembar evaluasi, dan sebagainya.

Langkah kedua adalah menjawab pertanyaan terkait kategori sistem elektronik yang digunakan di Kota Denpasar, bagian ini bertujuan mengevaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan di Kota Denpasar. Tujuan dari langkah kedua ini untuk dapat mengelompokkan sistem elektronik ke kategori rendah, tinggi, atau strategis melalui beberapa pertanyaan terkait nilai investasi, total anggaran operasional, kewajiban kepatuhan terhadap standar tertentu, jumlah pengguna, hingga potensi

kerugian dari insiden ditembusnya sistem manajemen keamanan informasi. Total pertanyaan sebanyak sepuluh buah, dan hasilnya dapat dilihat di Tabel I.

Tabel 1. Kategori Sistem Elektronik

Bagian I: Kategori Sistem Elektronik			
Bagian ini mengevaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan			
[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis			
Jumlah Pertanyaan			10
Jawaban Bagian I			
A	B	C	
2	6	2	
Skor Bagian I			24

Dengan nilai 24 dapat disebut bahwa sistem elektronik yang digunakan di pemerintah kota Denpasar termasuk kategori tinggi.

Tabel 2. Tata Kelola Keamanan Informasi

Bagian 2: Tata Kelola Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/perusahaan/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			
Jumlah Pertanyaan			22
Jawaban Bagian 2			
Status Pengamanan	Kategori Kontrol		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	-	3	6
Dalam Perencanaan	1	4	-
Dalam Penerapan / Penerapan Sebagian	5	1	-
Diterapkan Secara Menyeluruh	2	-	-
Total Nilai Bagian 2			29

Tabel 2. mengukur seberapa jauh pemerintah kota Denpasar melaksanakan tata kelola keamanan informasi dari sistem elektronik yang dimilikinya. Pertanyaan pada bagian ini fokus pertanyaan terkait adanya fungsi dari organisasi terhadap tata kelola keamanan informasi. Hasilnya dalam kategori control 3 tata kelola keamanan informasi tidak dilakukan. Sehingga total nilai dari bagian 2 sebesar 29.

Tabel 3. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Bagian 2I: Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			
Jumlah Pertanyaan			16
Jawaban Bagian 2I			
Status Pengamanan	Kategori Kontrol		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	10	4	2
Dalam Perencanaan	0	0	0
Dalam Penerapan / Penerapan Sebagian	0	0	0
Diterapkan Secara Menyeluruh	0	0	0
Total Nilai Bagian 2I			0

Tabel 3. memberikan gambaran bahwa walaupun penerapan sistem elektronik di kota Denpasar termasuk kategori tinggi namun dari Index Kami didapatkan gambaran bahwa Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki pengelolaan resiko keamanan informasi.

Tabel 4. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi

Bagian IV: Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan & prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			
Jumlah Pertanyaan			29
Jawaban Bagian IV			
Status Pengamanan	Kategori Kontrol		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	12	10	7
Dalam Perencanaan	0	0	0
Dalam Penerapan / Penerapan Sebagian	0	0	0
Diterapkan Secara Menyeluruh	0	0	0
Total Nilai Bagian IV			0

Tabel 4. Memberikan gambaran mengenai kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi di sistem manajemen keamanan informasi kota Denpasar. seluruh status pengamanan terkait tata kelola belum dilakukan di sistem elektronik kota Denpasar

Tabel 5. Pengelolaan Aset Informasi

Bagian V: Pengelolaan Aset Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			
Jumlah Pertanyaan			38
Jawaban Bagian V			
Status Pengamanan	Kategori Kontrol		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	17	9	4
Dalam Perencanaan	0	0	0
Dalam Penerapan / Penerapan Sebagian	7	1	0
Diterapkan Secara Menyeluruh	0	0	0
Total Nilai Bagian V			18

Tabel 5. Pengelolaan aset terlihat gambaran bahwasanya dalam sistem manajemen keamanan informasi di Kota Denpasar belum melakukan pengelolaan aset dan hanya sampai pada proses dalam perencanaan. Sehingga pendataan dan pengelolaan terkait aset yang mereka miliki belum terukur dengan baik.

Tabel 6 Teknologi Keamanan Informasi

Bagian VI: Teknologi dan Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			
Jumlah Pertanyaan			26
Jawaban Bagian 2 Tata kelola Keamanan Informasi			
Status Pengamanan	Kategori Kontrol		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	6	8	2
Dalam Perencanaan	0	0	0
Dalam Penerapan / Penerapan Sebagian	7	1	0

Diterapkan Secara Menyeluruh	1	1	0
Total Nilai Bagian VI			27

Tabel 6. teknologi dan kewanan informasi memberikan gambaran bahwasanya sebagian besar langkah pengamanan untuk tata kelola keamanan informasi pada status “tidak dilakukan”, 8 dengan status “dalam penerapan/penerapan sebagian”, dan hanya 2 yang memiliki status “diterapkan secara menyeluruh”.

Tabel 7. Suplemen

Bagian V2: Suplemen			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			
Jumlah Pertanyaan	53		
Jawaban Bagian 2 Tata kelola Keamanan Informasi			
Status Pengamanan	Kategori Kontrol		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	0	0	53
Dalam Perencanaan	0	0	0
Dalam Penerapan / Penerapan Sebagian	0	0	0
Diterapkan Secara Menyeluruh	0	0	0
Total Nilai Bagian V2			0

Tabel 7. Suplemen bertujuan untuk mengukur tingkat pengamanan dengan pihak ke tiga, langkah pengamanan untuk cloud computing, dan perlindungan data pribadi. Berdasarkan Tabel diatas terlihat jelas bahwasanya sistem manajemen keamanan informasi di Pemerintah Kota Denpasar belum menerapkan sama sekali penerapan keamanan yang diminta dalam penilaian suplemen.

Hasil Pengukuran Index Kami 4.0

Berdasarkan hasil pada data pengukuran Index Kami 4.0 diperoleh hasil mengenai gambaran bagaimana peran serta penggunaan teknologi informasi di Pemerintah Kota Denpasar, serta nilai tingkat kematangan dari pengelolaan keamanan sistem informasi di Kota Denpasar.

Untuk bagian I pada Tabel I. Dapat dilihat bahwa Teknologi informasi dan computer memiliki peran penting.

Ditunjukkan berdasarkan Nilai sebesar 24 yang memiliki arti memiliki kategori Tinggi.

Untuk bagian 2, 2I, IV, V, dan VI digunakan untuk mengukur tingkat maturity level dari sistem manajemen keamanan informasi Kota Denpasar. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengukuran Index Kami 4.0

INDEX KAMI 4.0	SKOR	MATURITY LEVEL
Bagian 2 : Tata kelola keamanan Informasi	29	I+
Bagian 2I : Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	0	I
Bagian IV : Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	0	I
Bagian V : Pengelolaan Aset Informasi	18	I
Bagian VI : Teknologi dan Keamanan Informasi	27	I
Total Skor	74	I – I+

Total Skor kematangan untuk bagian 2 sampai bagian VI adalah 74 dalam maturity level masuk dalam kategori I-I+. Artinya sistem manajemen keamanan informasi kota Denpasar berada pada kondisi awal atau reaktif. Arti kondisi awal atau reaktif adalah sudah adanya pemahaman mengenai pengelolaan keamanan sistem informasi namun penerapan langkah pengamanan masih bersifat reaktif dan tidak mengacu pada keseluruhan resiko yang ada.

Untuk Bagian V2 suplemen yang merupakan pengukuran untuk pengamanan dengan pihak ke-3, pengamanan teknologi cloud computer, dan perlindungan data pribadi, sistem manajemen keamanan Informasi di Kota Denpasar berada pada rasio 0% atau belum ada sama sekali kegiatan pengamanan di tiga kategori tersebut.

Sehingga dari pengukuran Index Kami 4.0 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem manajemen keamanan informasi di Pemerintah Kota Denpasar berada pada tahap **Tidak Layak**. Seperti gambaran pada Tabel 9

Tabel 9. Hasil Pengukuran Index Kami 4.0

Klasifikasi					
Rendah	10	15	0	174	Tidak Layak
			175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
			313	535	Cukup Baik
			536	645	Baik
Tinggi	16	34	0	272	Tidak Layak
			273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
			456	583	Cukup Baik
			584	645	Baik
Strategis	35	50	0	333	Tidak Layak
			334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
			536	609	Cukup Baik
			610	645	Baik

Rekomendasi Keamanan Informasi untuk Pemerintah Kota Denpasar

Hasil pengukuran di kota Denpasar menunjukkan bahwa tingkat kematangan ada di skala I-I+ sedangkan untuk kesiapan mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 tingkat kematangan sistem manajemen keamanan informasi harus berada pada level IV terkelola dan terukur. Untuk dapat mencapai hal tersebut ada hal-hal yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan tingkat kematangan adalah sebagai berikut :

- Bagian I : perlu adanya peningkatan anggaran dalam rangka kegiatan operasional dan monitoring terhadap sistem manajemen keamanan informasi
- Bagian 2 : jawaban diterapkan secara menyeluruh hanya 2 dari total 22 pertanyaan. Perlunya langkah kongkrit untuk menuju penerapan secara menyeluruh terkait aspek penanggung jawab dari pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi, serta tindakan berkelanjutan terkait dengan tata kelola sistem manajemen keamanan informasi
- Bagian 2I Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi : proses ini belum dilaksanakan di dalam sistem manajemen keamanan informasi kota Denpasar oleh sebab itu perlu langkah kongkrit dalam proses pengelolaan resiko, dimulai dengan penunjukan pelaksana pengukuran resiko, kerangka kerja, serta langkah langkah pengembangan terkait pengelolaan resiko keamanan informasi.
- Bagian 4 : Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi : perlu dilaksanakan dokumentasi yang jelas terhadap kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi, melaksanakan proses uji coba yang terjadwal, serta proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
- Bagian V Pengelolaan Aset Keamanan Informasi : perlunya proses pengelolaan asset sistem manajemen keamanan informasi di internal yang terdokumentasi, terdefinisi, dan jelas pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Dokumentasi asset juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Bagian VI Teknologi dan Keamanan informasi : perlu adanya dokumentasi yang jelas terkait kelengkapan, evaluasi efektifitas penggunaan teknologi, monitoring dalam rangka vulnerability assessment dan updating dari teknologi yang diterapkan.
- Bagian V2 Suplemen : perlunya Memorandum Of Understanding dengan pihak ketiga sebagai mitra Kota Denpasar untuk melakukan proses keamanan Informasi terhadap sistem cloud yang digunakan sehingga terjamin tingkat keamanannya.

SIMPULAN

Dengan menggunakan Index Kami 4.0 dapat diukur tingkat kematangan atau maturity level dari sistem manajemen keamanan informasi Pemerintah Kota Denpasar.

Hasil yang diperoleh adalah tingkat kematangan sistem manajemen keamanan informasi di Pemerintah Kota Denpasar berada pada level I-I+ yang berarti dalam kategori kondisi awal atau reaktif, dan untuk dapat memiliki sertifikasi ISO 27001:2013 harus ditingkatkan ke level IV.

Hasil Index Kami 4.0 dalam sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah kota Denpasar berada pada kategori tinggi namun tidak layak untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001

Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 Pemerintah Kota Denpasar harus meningkatkan Level Sistem manajemen keamanan sistem informasinya ke level IV terkelola dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dyah Puspito, "Survei PBB 2018: Peringkat E-Government Indonesia" BPPT, Jakarta
- [2] M. Prawiro, "Pengertian Informasi Adalah: Definisi, Fungsi, Jenis, Contoh Informasi," *Pengertian dan Definisi Istilah*, 28-Aug-2018. .
- [3] F. A. Basyarahil, "Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Berdasarkan ISO/IEC 2700:2013 Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Dan Sistem Informasi (DPTSI) ITS Surabaya," Undergraduate, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017.
- [4] E. R. Pratama, "Evaluasi Tata Kelola Sistem Keamanan Teknologi Informasi Menggunakan Indeks KAMI dan ISO 27001 (Studi Kasus KOMINFO Provinsi Jawa Timur)," p. 10.
- [5] Symantec, "Internet Security Threat Report," vol. 2019.
- [6] No Name "Indeks Keamanan Informasi" BSSN, Jakarta.